

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi yaitu urutan ke empat di dunia. Jumlah penduduk yang besar tersebut juga menjadi masalah besar bagi upaya pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan kehidupan bangsanya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Salah satu langkah pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran adalah melakukan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri. Tingkat pendidikan yang cukup rendah dan tidak merata serta hal lainnya seperti pola pikir lingkungan tempat tinggal ditambah maraknya percaloan TKI merupakan beberapa penyebab banyak diantara para calon TKI dari daerah ini tidak hanya kemudian menjadi TKI *illegal* dengan banyak risiko yang harus dihadapi tetapi juga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/*trafficking*.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kendal terhadap TKI *illegal* korban *trafficking* serta upaya dan kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan terhadap TKI *Illegal*. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kendal, Polisi daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG), dan Kepolisian Resor (Polres) Kendal dan Korban TKI *illegal*.

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, TKI *Illegal*, Trafficking

Abstract

Indonesia has high population of citizen which is number four in the world. The high population of citizen is a big problem for Indonesia's government efforts to prosper its people's life. This can be seen in the number of workers development that is not balance with labor ability which involve the number of unemployment increase in Indonesia. One of government actions to reduce unemployment population is to send Indonesian labors to overseas. The low level of unequal education such as the mindset of habitation and the amount of Indonesian labors' pimp is several causes that makes Illegal Labors should face many risks therefore make them become victims of Human Trafficking.

The problem in this case is what kind of protection that can be given from the Kendal government to the illegal Indonesian labors trafficking, effort, and obstacles which should be face in giving protection for the illegal Indonesian labors. Thus, the approachment used in this research is juridical empiric. This juridical empiric approach is a procedure that use to solve this research problem and use secondary data previously and then proceed with primery data in social life. The utility of this empirical research is to discover the result and information through the real object in Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kendal, Polisi Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG), and Kepolisian Resor (Polres), and victim of Illegal Indonesian Labors.

Keywords: Role of Local Government, Illegal Labors, Trafficking